



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LAP-065/PW21/6/2023 10 April 2023
Hal : Laporan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan
I Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan pada Aplikasi E-Sakip

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Di Makassar

Dengan ini kami sampaikan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada Aplikasi E-Sakip, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

A. Umum

1. Dasar Pelaksanaan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/ST-476/PW21/6/2023 tanggal 28 Maret 2023, hal kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja (*outcome*) melalui Aplikasi E-SAKIP Triwulan I Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penugasan

Kegiatan ini dilaksanakan selama sembilan hari kerja mulai tanggal 28 Maret s.d. 10 April 2023.

3. Tujuan

Penugasan ini bertujuan untuk melakukan pelaporan data terkait Realisasi Capaian Kinerja (*outcome*) melalui Aplikasi E-SAKIP Triwulan I Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah penginputan data realisasi capaian kinerja (*outcome* dan *output*) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2023 pada aplikasi E-Sakip.

B. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

Target *outcome* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan capaian kinerja masing-masing diukur dengan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2023 telah diinput pada aplikasi E-Sakip. Capaian realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, disajikan sebagai pada tabel berikut:

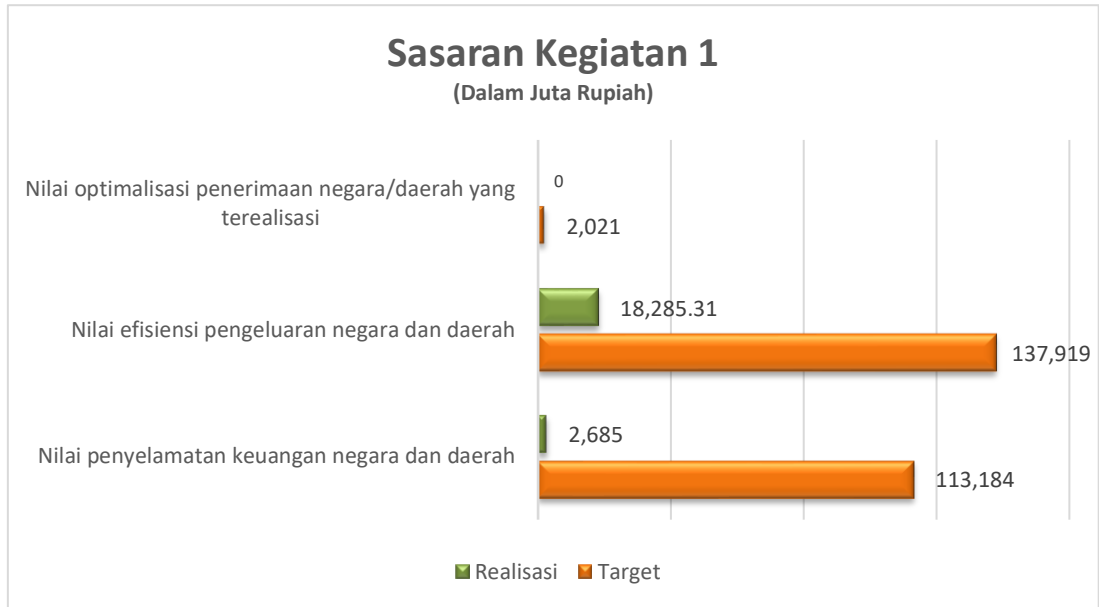
No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi sd. Triwulan I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah				
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.021,00	0	0%
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	137.919,00	18.285,31	13,58%
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	113.184,00	2.685	2,37%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional				
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1	100%
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	0	0%
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	0	0%
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan				
3.1	Persentase Rekomendasi Strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	0	0%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha				
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	2,00	0	0%
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	0	0%
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4,00	0	0%
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	69,00	0	0%
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00	0	0%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi				
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	0	0%
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	0	0%
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	6,00	0	0%



No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi sd. Triwulan I	Capaian (%)
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	2,00	0	0%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU				
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	0	0%
6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	21,00	14	66,67%
6.3	Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	1	100%
6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	20,00	16	80%
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1,00	0	0%
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4,00	0	0%
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	8,00	0	0%
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	0	0%
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	0	0%
6.10	Jumlahh BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	2,00	0	0%
6.11	Jumlahh BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	8,00	0	0%
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	2,00	0	0%
6.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	2,00	0	0%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja				
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	0	0%
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	0	0%
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	0	0%
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	40	40%
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	0	0%
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95,00	0	0%
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	0	0%

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah





- a. IKK 1.1: Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) belum terealisasi karena pelaksanaan pengawasan evaluasi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.
- b. IKK 1.2: Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah terealisasi sebesar Rp18.285.216.795,00. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan kegiatan Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran.

Capaian realisasi kinerja atas IKK 1.2 sebesar Rp18.285.216.795,00 atau 13,58% dari target bidang APD Tahun 2023 sebesar Rp134.621.000.000,00. Capaian atas target keseluruhan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 13,25% dari target total Tahun 2023 sebesar Rp137.919.000.000,00.
- c. IKK 1.3: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, realisasi atas IKK nilai penyelamatan keuangan Negara tercapai sebesar Rp2.685.000.000,00. Nilai penyelamatan tersebut diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Investigasi melalui kegiatan Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Kredit



Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Angkasa Cabang Tamalanrea Tahun 2021-2022.

Capaian realisasi atas IKK 1.3 Sebesar Rp2.685.000.000,00 atau 2,37% dari target.

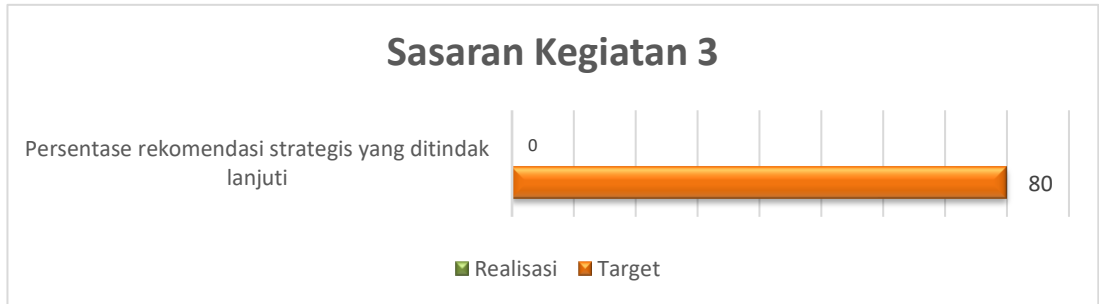
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional



- a. IKK 2.1: Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, terdapat 1 (satu) proyek strategis nasional yang telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pada Triwulan I. Capaian IKK 2.1 sebesar 1 dari 1 atau 100% dari target.
- b. IKK 2.2: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang di selesaikan masih dalam proses pemenuhan kinerja dikarenakan pengusan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan masih dalam proses penyusunan laporan.
- c. IKK 2.3: Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dikarenakan penugasan APPD baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III Tahun 2023.

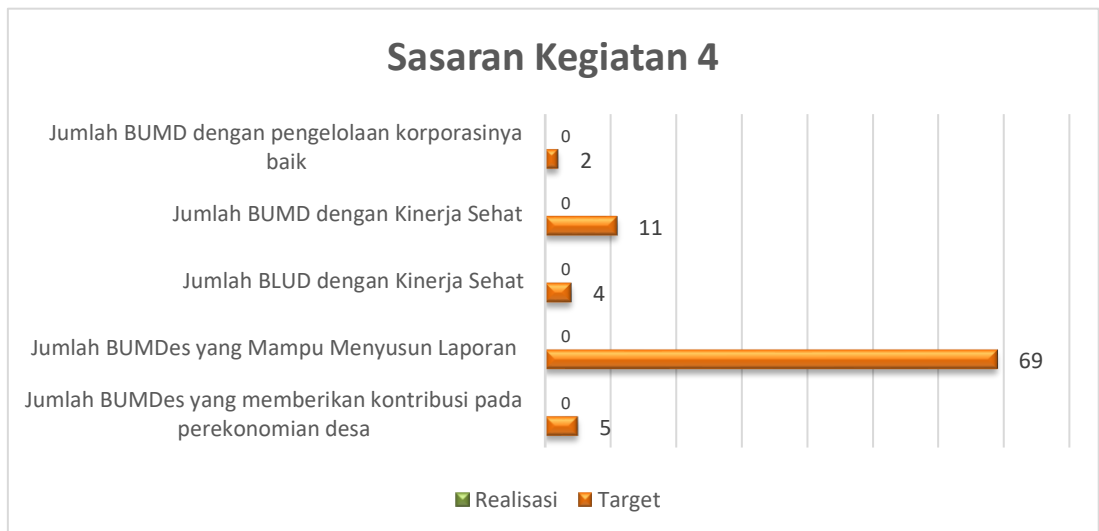


3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada KLD/BU yang menjadi tanggungjawab perwakilan



- a. IKK 3.1: Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses monitoring tindak lanjut atas rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2023.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengawasan pembangun atas badan usaha



- a. IKK 4.1: Jumlah BUMD dengan pengelolaan koporasinya baik
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik karena evaluasi kinerja atas BUMD akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.
- b. IKK 4.2: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat BUMD dengan Kinerja Sehat karena evaluasi kinerja atas BUMD akan dilaksanakan pada



Triwulan II Tahun 2023 yang selanjutnya akan dilakukan validasi oleh rendal pada bulan Juni Tahun 2023.

c. IKK 4.3: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat BLUD dengan Kinerja Sehat karena evaluasi kinerja atas RSUD BLUD akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.

d. IKK 4.4: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

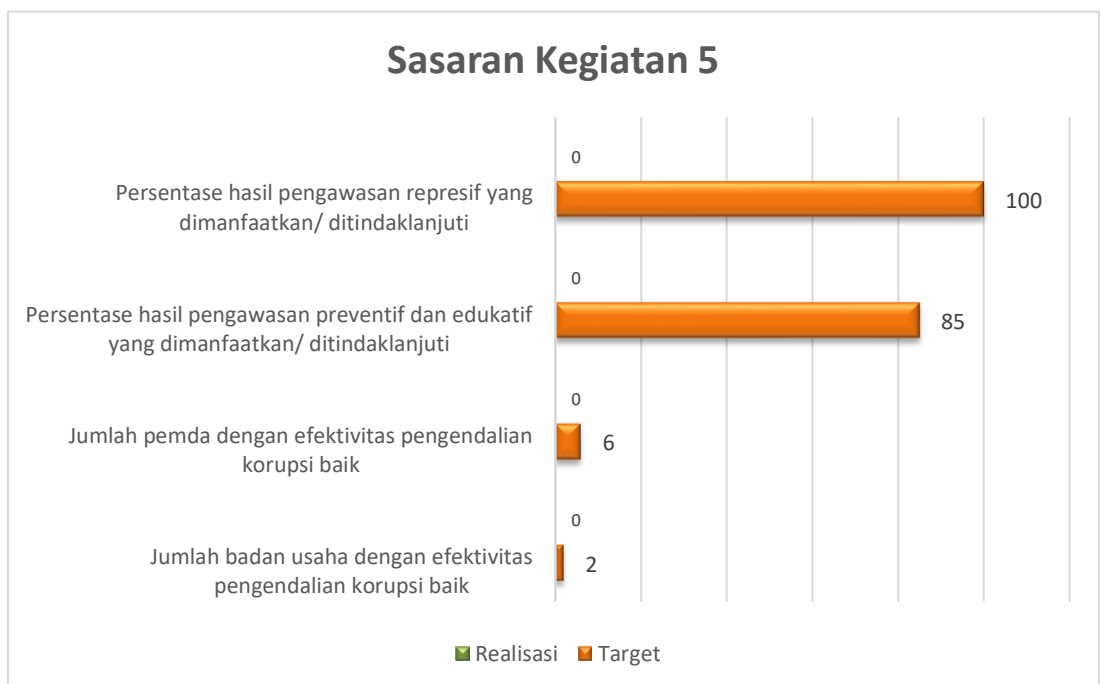
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat BUMDes yang mampu menyusun laporan dikarenakan masih dalam proses penyusunan laporan.

Strategi untuk mencapai target yang telah dilakukan adalah melaksanakan monitoring yang telah dilaksanakan pada Kabupaten Soppeng.

e. IKK 4.5: Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa dikarenakan sebagian besar BUMDes masih dalam proses penyusunan laporan.

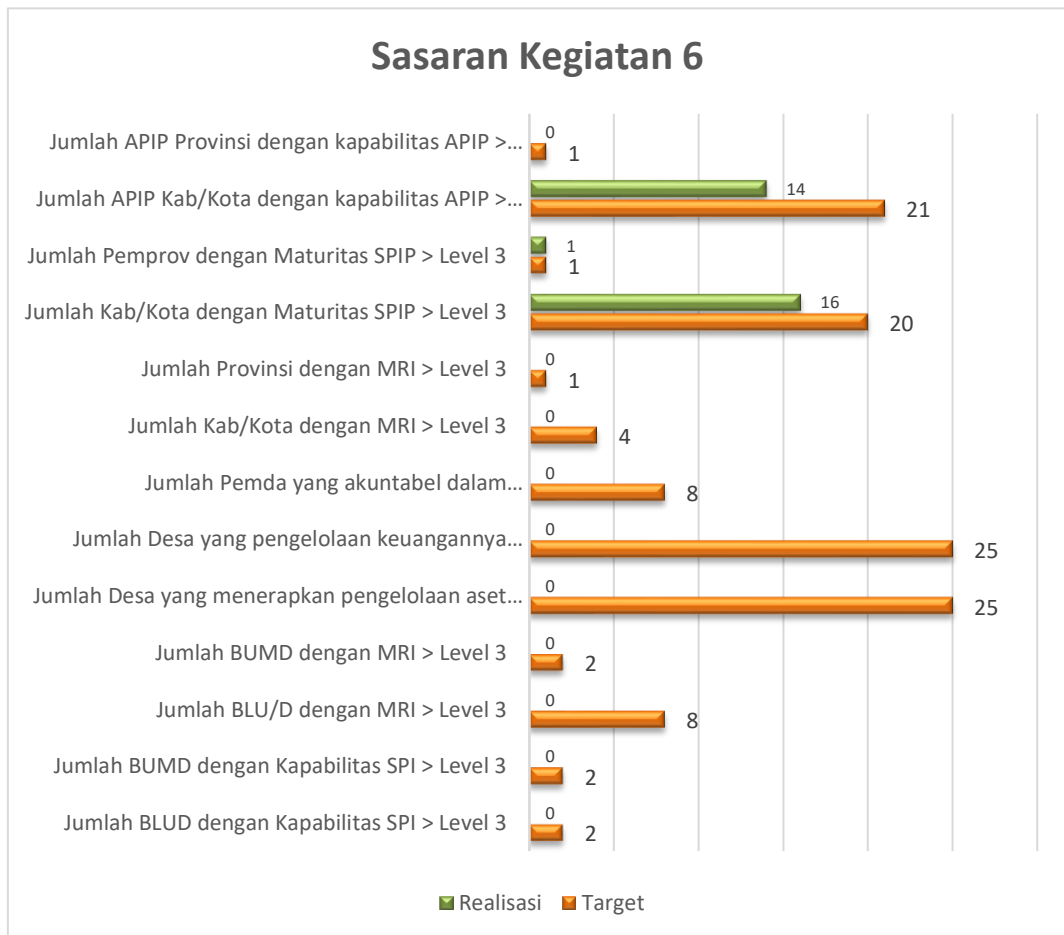
5. Sasaran kegiatan 5: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi



- a. IKK 5.1: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, IKK 5.1 belum tercapai karena penugasan pengawasan represif baru akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.
- b. IKK 5.2: Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, IKK 5.2 belum tercapai karena penugasan pengawasan represif baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.
- c. IKK 5.3: Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis peningkatan IEPK. Evaluasi baru akan dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan bimbingan teknis peningkatan IEPK.
- d. IKK 5.4: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis peningkatan IEPK. Evaluasi baru akan dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan bimbingan teknis peningkatan IEPK.



6. Sasaran kegiatan 6: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU



- a. IKK 6.1: Jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas APIP \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, APIP Provinsi Sulawesi Selatan belum terpenuhi, dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan penilaian mandiri. Evaluasi Kapabilitas APIP akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.
- b. IKK 6.2: Jumlah APIP Kab/Kota dengan kapabilitas APIP \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 terdapat 14 (empat belas) APIP Kabupaten/Kota yang mencapai Level 3, yaitu:
 - 1) APIP Kota Palopo
 - 2) APIP Kabupaten Bantaeng
 - 3) APIP Kabupaten Gowa
 - 4) APIP Kabupaten Maros
 - 5) APIP Kabupaten Wajo
 - 6) APIP Kota Parepare
 - 7) APIP Kabupaten Bone
 - 9) APIP Kabupaten Luwu Utara
 - 10) APIP Kabupaten Pinrang
 - 11) APIP Kabupaten Sidrap
 - 12) APIP Kota Makassar
 - 13) APIP Kabupaten Enrekang
 - 14) APIP Kabupaten Sinjai



8) APIP Kabupaten Luwu Timur

Capain atas IKK 6.2 sebesar 66,67% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 21 APIP atau tercapai 66,67% dari target tahun 2023 sebanyak 21 APIP.

Belum tercapainya target karena evaluasi Kapabilitas APIP akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

c. IKK 6.3: Jumlah Pemprov dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3. Capaian kinerja atas IKK 6.3 sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi atau tercapai 100% dari target Tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi.

d. IKK 6.4: Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I terdapat 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3, yaitu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) Kota Parepare | 11) Kota Palopo |
| 2) Kota Makassar | 12) Kabupaten Soppeng |
| 3) Kabupaten Sinjai | 13) Kabupaten Luwu Timur |
| 4) Kabupaten Maros | 14) Kabupaten Bulukumba |
| 5) Kabupaten Luwu | 15) Kabupaten Kep. Selayar |
| 6) Kabupaten Luwu Utara | 16) Kabupaten Wajo |
| 7) Kabupaten Bantaeng | |
| 8) Kabupaten Sidrap | |
| 9) Kabupaten Pinrang | |
| 10) Kabupaten Gowa | |

Capain atas IKK 6.4 sebesar 80,00% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 20 Kabupaten/Kota atau tercapai 80,00% dari target tahun 2023 sebanyak 20 Kabupaten/Kota.

Belum tercapainya target karena Maturitas SPIP \geq Level 3 akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

e. IKK 6.5: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, IKK Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan pendampingan. Penilaian MRI \geq Level 3 akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023.

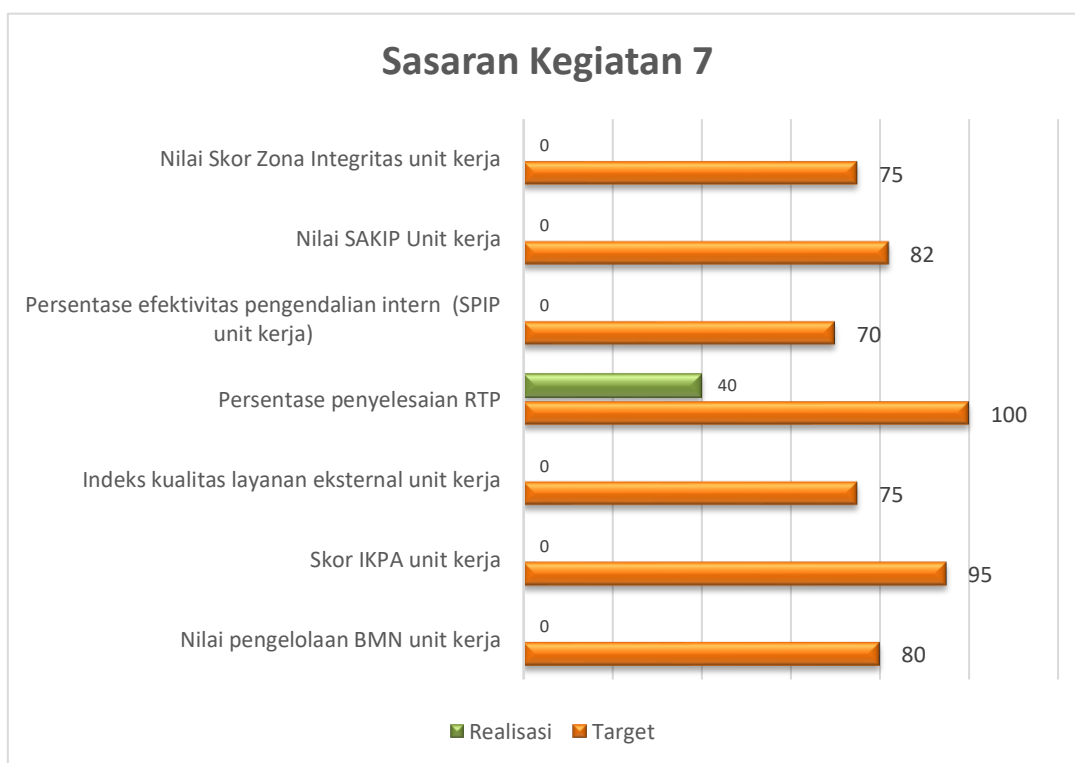


- f. IKK 6.6: Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, IKK Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 belum terpenuhi dikarenakan masih dalam proses bimbingan teknis dan pendampingan. Penilaian MRI \geq Level 3 akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023.
Strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan teknis berkelanjutan terhadap implementasi pengendalian risiko pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- g. IKK 6.7: Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat pemerintah daerah yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerjanya dikarenakan hasil opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum diumumkan oleh BPK.
- h. IKK 6.8: Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat desa yang pengelolaannya akuntabel dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan monitoring.
- i. IKK 6.9: Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat desa yang pengelolaan aset desanya memadai dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan monitoring.
- j. IKK 6.10: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat BUMD dengan MRI $>$ Level 3 karena penilaian MRI akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
- k. IKK 6.11: Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat BLU/D dengan MRI $>$ Level 3 karena penilaian MRI akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
Sosialisasi dan pendampingan pada 3 RSUD saweri gadign, lakipadada, RSUD kota makassar



- I. IKK 6.12: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat BUMD dengan Kapabilitas SPI $>$ Level 3 karena penilaian SPI akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023
- m. IKK 6.13: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, belum terdapat BLUD dengan Kapabilitas SPI $>$ Level 3 karena penilaian SPI akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.

7. Sasaran kegiatan 7: Meningkatnya kualitas tata kelola unit kerja



- a. IKK 7.1: Nilai Skor Zona Integritas unit kerja
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penilaian mandiri atas capaian skor zona integristas. Evaluasi atas penilaian mandiri akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.
- b. IKK 7.2: Nilai SAKIP Unit kerja
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, nilai SAKIP Unit Kerja belum diperoleh dikarenakan pelaksanaan evaluasi atas SAKIP Perwakilan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.



- c. IKK 7.3: Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)
Sampai dengan Triwulan I, persentase efektivitas pengendalian intern belum diperoleh dikarenakan pelaksanaan penilaian atas SPIP Perwakilan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.
- d. IKK 7.4: Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja)
Sampai dengan Triwulan I, terdapat 2 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diselesaikan atau 40% dari total 5 RTP pada Triwulan I Tahun 2023
- e. IKK 7.5: Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, IKK 7.5 belum tercapai karena Penilaian atas Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.
- f. IKK 7.6: Skor IKPA unit kerja
Capaian atas skor IKPA Unit Kerja Tahun 2022 adalah sebesar 96,28%. Capaian atas skor IKPA untuk Tahun 2023 belum dilakukan karena baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran.
- g. IKK 7.7: Nilai pengelolaan BMN unit kerja
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan belum memperoleh nilai dikarenakan penilaian terhadap pengelolaan BMN akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

C. Hambatan dan Kendala

Hambatan dalam penugasan ini, adalah kurangnya koordinasi bidang terkait data realisasi capaian kinerja dari penugasan yang telah dilaksanakan sehingga tim membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi capaian kinerja dari masing-masing bidang.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penginputan data realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2023 pada aplikasi E-Sakip dapat memberikan gambaran mengenai realisasi capaian kinerja baik *outcome* dan *output* triwulan I Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dikompilasi menjadi *output* BPKP.



2. Saran

Disarankan kepada setiap korwas untuk menunjuk PFA yang ditugaskan untuk melakukan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan dan melaksanakan pembahasan terkait hambatan dan strategi untuk mencapai target.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Pengawasan P3A,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Raden Kemal Ramdan

